



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG SUMBER DAYA AIR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUL KADIR**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**
3. NHK : **518860**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.041.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 501 m<sup>2</sup>/426 m<sup>2</sup> di KOTA MATARAM ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.252.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 758 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di LOMBOK  
TENGAH, WARISAN Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 2880 m<sup>2</sup> di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.  
500.000.000
4. Tanah Seluas 2188 m<sup>2</sup> di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.  
109.400.000
5. Tanah Seluas 789 m<sup>2</sup> di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp.  
380.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 422.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
275.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 16.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 19.973.273

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 3.499.873.273



III. HUTANG

Rp.

122.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.377.373.273

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.